

PENGAJARAN BAHASA DAN SASTRA SASAK DI SEKOLAH (Hambatan dan Alternatif Pemecahannya)

**Lalu Habiburrahman
Dosen IKIP Mataram**

Abstrak ; Di dunia saat ini, terdapat tidak kurang dari 6000 bahasa. Separuh dari bahasa-bahasa tersebut terancam punah. Dari jumlah 6000 bahasa tersebut, sebanyak 746 bahasa berada di Indonesia. Bahasa-bahasa tersebut tersebar dari ujung timur hingga ujung barat kepulauan Indonesia. Kondisi bahasa-bahasa yang ada di Indonesia juga tidak lepas dari ancaman kepunahan. Ancaman muncul antara lain karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Survey tahun 1999 menemukan bahwa hanya 15 provinsi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang membelajarkan bahasa daerah. Penerapan kurikulum 2013 yang baru dilakukan pemerintah menghilangkan Mulok. Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah pada kurikulum 2013 adalah bagian integral dari pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBP), meliputi berbagai kompetensi beberapa jenis kesenian, baik seni tari, seni musik, seni kriya dan sebagainya. Menyikapi kondisi kurikulum 2013, Pemerintah Jawa Tengah menerbitkan peraturan yang mewajibkan: a). pembelajaran Bahasa dan Sastra Jawa di sekolah; b). penggunaan Bahasa Jawa sehari dalam seminggu di semua instansi pemerintah; c). mengizinkan penggunaan Bahasa Jawa dalam rapat paripurna. Sikap yang diambil pemerintah Jawa tengah ini telah mengangkat gengsi bahasa dan sastra daerah menjadi bahasa resmi dan bahasa ilmu pengetahuan. Jika pembelajaran Bahasa dan Sastra Jawa Tengah segera mendapat perlindungan dari pemerintah, pada kasus pembelajaran Bahasa dan Sastra Sasak kondisinya berbeda. Dari survey sederhana yang dilakukan ditemukan: a). terdapat sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan Bahasa Sasak; b). banyak orang tua di Kota Mataram (Lombok, NTB) dan sekitarnya yang memilih menggunakan Bahasa Indonesia dalam komunikasi di lingkungan keluarga; c). belum ditemukan aturan penggunaan Bahasa Sasak di Instansi-instansi pemerintah di Lombok (NTB). Untuk menyikapi permasalahan pembelajaran tersebut, beberapa alternatif yang ditawarkan: a). perlu ada peraturan pemerintah daerah yang memungkinkan gengsi Bahasa dan Sastra Sasak meningkat menjadi bahasa resmi dan bahasa ilmu pengetahuan; b). perlu ada upaya instansi terkait untuk melakukan digitalisasi dan publikasi hingga ke sekolah-sekolah, naskah-naskah klasik Berbahasa Sasak, koleksi museum Negeri NTB; c). perlu ada upaya transliterasi dan digitalisasi hasil transliterasi naskah-naskah klasik Berbahasa Sasak koleksi Museum Negeri NTB untuk menyediakan sumber belajar Bahasa dan Sastra Sasak hingga di sekolah-sekolah.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah kebudayaan berbagai suku bangsa yang ada di dunia ini, dua hal di antara kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak akan pernah terpisah dari keberadaan suku bangsa tersebut adalah bahasa dan sastra. Bahasa akan senantiasa ada pada semua suku-bangsa yang ada, mengingat peran pentingnya sebagai sarana penghubung interaksi manusia satu dengan lainnya. Peran penting yang diemban bahasa terutama terkait hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Sementara itu, peran sastra lebih pada

pewaris kearifan-kearifan generasi sebelumnya kepada penerus suku bangsa tersebut.

Bahasa memiliki sifat dinamis, bahasa akan terus berkembang mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Hal ini terkait fungsi bahasa dalam menjembatani kebutuhan-kebutuhan manusia untuk mengidentifikasi berbagai hal disekitarnya. Kondisi ini berdampak dua hal, pertama, pada bahasa yang penggunaannya penyumbang teknologi dan ilmu pengetahuan baru, cenderung akan menelurkan istilah-istilah baru. Kedua,

bahasa yang cenderung menjadi konsumen dari teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut akan mengambil bentuk asli dari istilah yang dimunculkan atau mencari padanannya dalam bahasa yang dipergunakan (bahasa Ibu). Kondisi ini berdampak, meski di dunia saat ini terdapat banyak bahasa, faktanya tidak semua bahasa tersebut dapat bertahan hidup bahkan di komunitas penggunaannya sendiri.

Menurut data *Ethologue: Languages of the World* (baca pula Grimes, 2002) di dunia saat ini, terdapat tidak kurang dari 6.000 bahasa. Unesco memperkirakan, separuh dari bahasa-bahasa tersebut terancam kepunahan (Sobarna, 2007 : 13, dalam Makara, 2007 : 13-17, periksa juga Tempo Interaktif, Online, Rabut 21 Februari 2007). Dari jumlah 6000 bahasa tersebut, 61% bahasa yang ada, tersebar di Kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan data Unesco, 700 dari jumlah bahasa tersebut terdapat di Indonesia. Jumlah sedikit berbeda dikemukakan Dendy Sungono merujuk pada hasil identifikasi Pusat Bahasa tahun 2007, yakni sebanyak 746 bahasa yang tersebar di Indonesia (Tempo Interaktif, Online, Rabu 21 Februari 2007). Kondisi bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia faktanya juga mengalami ancaman kepunahan.

Faktor penyebab munculnya ancaman kepunahan terhadap bahasa daerah di Indonesia, antara lain, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Survei tahun 1999 (Rusyana dalam Rosidi „ed.“, 1999: 72-75), bahasa daerah diajarkan di lima belas propinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Bali. Provinsi lain yang menyusul mengajarkan bahasa daerah, yaitu Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jakarta, Irian Jaya, dan Nusa Tenggara Timur. Bahasa-

Jurnal Pendidikan Mandala

bahasa daerah itu diajarkan pada jenjang SD dan SLTP. Kasus di Jawa, bahasa Jawa baru diajarkan di sekolah guru dan SMA Jurusan Bahasa. Untuk Propinsi Bali, Bahasa Bali diajarkan sampai tingkat SMA. Demikian juga di Jawa Barat, pengajaran bahasa Sunda juga diajarkan sampai SMA (Wibawa, 2007:1).

Pembaruan kurikulum dengan menerapkan kurikulum 2013 yang dilakukan pemerintah baru-baru ini, bukannya menjadi angin segar bagi pembelajaran bahasa dan sastra daerah. Pada kurikulum 2013, Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah yang pernah ada pada kurikulum sebelumnya (kurikulum 2006), ternyata tidak lagi tercantum sebagai mata pelajaran mulok. Selain itu di dalam Kurikulum 2013, tidak dicantumkan nama mata pelajaran bahasa daerah secara eksplisit, tetapi secara implisit terintegrasi dengan mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBP). Seni Budaya dan Prakarya (SBP) merupakan integrasi dari berbagai kompetensi beberapa jenis kesenian, baik seni tari, seni musik, seni kriya dan sebagainya (periksa Bambang Sugiharto, November 2013, <http://bahasa.kompasiana.com/2013/11/28/penerapan-bahasa-daerah-pada-kurikulum-2013-di-jawa-barat-613871.html>).

Meski ada persoalan terkait pembelajaran bahasa dan sastra daerah, muncul dalam kurikulum 2013, beberapa daerah membuat aturan sendiri terkait pembelaran bahasa dan sastra daerah. Salah satu contoh, Provinsi Jawa Tengah. Melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah No 424.I3242 tertanggal 23 Juli 2013 (<http://bahasa.kompasiana.com/2013/08/13/menyelamatkan-bahasa-jawa-580736.html>), menetapkan bahwa Pemerintah Jawa Tengah mewajibkan pembelajaran bahasa dan sastra daerah di sekolah-sekolah. Tindakan lebih lanjut yang dilakukan Pemerintah Jawa Tengah, yakni dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 55/ 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa

Tengah No. 57/ 2013, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa. Isi pokok dari peraturan tersebut yakni adanya kewajiban bagi semua instansi pemerintah di Jawa Tengah untuk mempergunakan Bahasa Jawa, sekali dalam seminggu. Pokok lain dari Pergub ini, yakni ketentuan untuk membolehkan penggunaan Bahasa Jawa pada rapat paripurna (periksa, <http://regional.kompas.com/read/2014/09/08/20241191/> Gubernur.

Jateng.Segera.Berlakukan.Aturan.Sehari.Berbahasa.Jawa). Dengan kebijakan ini, Pemerintah Daerah Jawa Tengah pada prinsipnya telah meningkatkan gengsi bahasa daerah pada tingkat yang lebih tinggi, yakni menjadi bahasa resmi dan bahasa ilmu pengetahuan.

Kondisi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Sasak

Dalam kajian-kajian ilmiah, kajian terhadap Bahasa Sasak dan Sastra Sasak banyak dilakukan oleh akademisi. Selain itu, peran aktif dari Kantor Bahasa NTB telah memberikan sumbangsih besar terhadap bahasa dan sastra di NTB (termasuk Bahasa dan Sastra Sasak). Dari sebuah sumber bahkan didapati bahwa pada tahun 2014 mendatang, Kantor Bahasa Provinsi NTB telah mempersiapkan sejumlah program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra seperti: a). program penelitian penerjemahan sastra lisan; b). penelitian bahasa dan sastra di wilayah terpencil; c). penelitian sikap penutur bahasa di daerah wisata; d). penyusunan kamus dwibahasa Sasak; e). penyusunan materi mulok tingkat SLTP; f). pementasan sastra lisan etnis; g). antologi cerpen oleh siswa di pulau Sumbawa bagian utara; h). pelaksanaan kongres bahasa daerah; dan i). sosialisasi materi mulok dan lain sebagainya.

Fakta yang terjadi di lapangan saat ini, sepertinya patut menjadi perhatian bersama. Survey sederhana yang dilakukan beberapa waktu lalu terhadap beberapa

guru di Kodya Mataram, Lombok Utara dan Lombok Tengah NTB, mendapati data sebagai berikut: a). terdapat sekolah yang tidak lagi mengajarkan muatan lokal Bahasa Sasak karena guru yang memegang mata pelajaran tersebut pada tahun sebelumnya (2013) pindah tempat tugas (kasus di salah satu SD di Kodya Mataram, hampir sama dengan kasus salah satu SD di Loteng); b). Terdapat Sekolah Menengah Atas yang mengajarkan pertamanan dan Bahasa Inggris Pariwisata (kasus di SMA di Lombok Tengah dan Lombok Utara).

Perilaku masyarakat terhadap Bahasa Sasak tidak lebih baik dari bagaimana sekolah-sekolah memperlakukan Bahasa Sasak. Dari pengamatan yang dilakukan, ditemukan, di pemukiman-pemukiman pendatang yang tersebar di Kota Mataram (Lombok, NTB) dan daerah-daerah penyangga kota seperti Rembiga, Labuapi, dan Gunungsari, ditemukan fenomena kecenderungan orang tua berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia, di lingkungan keluarga.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis tahun 2011, terdapat beberapa buku tentang Sasak yang sempat beredar luas termasuk di sekolah-sekolah. Buku-buku tersebut diantaranya: Lalu Azhar, *Sejarah Daerah Lombok, Arya Banjar Getas, Bedah Takepan-Babad dan Buku Sasak*; Lalu Djelenge, *Keris di Lombok*; Fath Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*; Lalu Bayu Windia, *Manusia Sasak, Bagaimana Menggaungnya*; H. Lalu Lukman, *Pulau Lombok, dan Sejarahnya ditinjau dari Aspek Budaya*; dan Lalu Wacana dkk, *Sejarah Nusa Tenggara Barat*. Buku-buku yang disebutkan tersebut semuanya di tulis dalam Bahasa Indonesia. Padahal beberapa buku yang disebutkan tersebut termasuk bahan ajar mulok.

Buku-buku yang Berbahasa Sasak dijumpai pada karya transliterasi ke tulisan latin dan terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Gde Suparman bekerja sama dengan Ida Putu Mragig. Ada juga karya transliterasi dan terjemahan

Sulistiaty. Karya-karya tersebut adalah adalah: Buku Babad Lombok, Buku Babad Seleparang, Buku Babad Praya dan Buku Babad Sakra. Buku-buku tersebut diterbitkan antara tahun 1993-1994. Pada penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2011, peredaran buku-buku ini di Lombok tergolong langka. Versi lengkap buku-buku ini penulis temukan justeru di Perpustakaan Universitas Negeri Malang.

Alternatif Pembelajaran Bahasa dan Sastra Sasak

Dari uraian di atas didapati, bahwa Pembelajaran Bahasa dan Sastra Sasak hingga saat ini masih terkendala banyak faktor. Faktor pertama, belum ada upaya positif dari pemerintah daerah dalam meningkatkan gengsi Bahasa Sasak pada derajat yang lebih tinggi seperti yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah. Hingga saat ini Bahasa dan Sastra Sasak seperti dibiarkan terlantar di luar instansi pemerintah maupun sekolah. Bahasa dan Sastra Sasak dibiarkan bertarung sendiri dengan bahasa kedua (baik Bahasa Indonesia maupun bahasa asing). Pada masa mendatang, pemerintah daerah perlu membuat aturan yang memungkinkan Bahasa dan Sastra Sasak bisa menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang dipelajari di sekolah-sekolah. Disamping itu perlu juga upaya untuk menjadikan Bahasa Sasak bahasa resmi di instansi pemerintah Nusa Tenggara Barat (terkait hal ini bisa disesuaikan dengan bahasa yang berlaku di kabupaten-kabupaten yang ada di NTB). Dengan cara seperti ini, kelas bahasa daerah (Sasak khususnya) akan terangkat menjadi bahas ilmu pengetahuan dan salah satu bahasa daerah resmi di NTB.

Faktor kedua, masih minimnya upaya publikasi buku-buku Berbahasa Sasak. Pada penelitian yang dilakukan Habiburrahman (2011), menemukan bahwa Bahasa Sasak yang digunakan pada Lontar Babad Lombok koleksi museum NTB, sama dengan Bahasa Sasak dalam Buku Babad Lombok hasil transliterasi Gde Suparman bekerja sama dengan Putu

Mregig¹. Dengan demikian, besar kemungkinan lontar-lontar babad lain seperti Lontar Babad Praya, Lontar Babad Seleparang dan Lontar Babad Sakra, akan menggunakan bahasa yang sama yakni Bahasa Sasak meski rata-rata menggunakan tulisan Bali Miring (lihat Riana pada catatan kaki no 2).

Lima lontar yang disebutkan tersebut adalah sebagian kecil dari koleksi naskah museum negeri NTB yang mencapai ribuan naskah kesusastraan klasik². Naskah-naskah klasik terutama

¹ Pengecekan kemiripan naskah lontar koleksi Museum NTB dengan transliterasi ulang oleh Suparman dilakukan bersama Lalu Nafsiah, pegawai Museum bidang filologi. Dari pengecekan secara acak ditemukan kesamaan bahasa yang dipergunakan yakni bahasa Sasak. Perbedaan-perbedaan yang ada justru pada isinya, misalnya pupuh pangkur dari naskah lontar hilang mulai sinom lempir 6B. puh sinom 313 yang pada naskah terjemahan terdapat pada bait 911 juga terdapat perbedaan penyebutan nama Lombok. Naskah terjemahan menyebut Lombok, sementara menyebutkan Sasak. Dari bait 1208 hingga bait terakhir dari naskah terjemahan dengan naskah lontar berbeda.

² Berdasarkan laporan Museum NTB, sejak tahun 1977-1978 sampai 1991-1992, Museum Nusa Tenggara Barat mengoleksi sebanyak 1250 buah naskah yang bahannya berupa: daun lontar, kertas, kulit kayu, dan bamboo. Isinya adalah: agama, filsafat, hukum, adat istiadat, sejarah, obat-obatan, serta ilmu-ilmu lainnya (Herman, 1991/1992:1).

Penelitian yang dilakukan oleh Riana (2009:4-5) menyimpulkan, ada keselarasan tradisi tulis-menulis di Bali dan Lombok. Perbedaannya terdapat pada hurufnya yang disebut Bali Jejawan-Bali Miring. Riana mengelompokkan lontar berdasarkan isinya (seperti yang dilakukannya di di Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana), menjadi tujuh kelompok;(a) kelompok weda (weda, mantra, kalpasastra); (b) kelompok agama (palakerta, sasana, niti, dan kitab-kitab hukum); (c) kelompok wariga (wariga, tutur, usada/pengobatan); (d) kelompok ithihasa (parwa, kakawin, kidung, gaguritan); (e) kelompok babad (sejarah, pamancanggh, paregreg; (f) kelompok tantri (tantrik hindu, cerita bali); dan (g) kelompok lelampahan yakni: naskah-naskah yang menceritakan lakon-lakon dan kesenian Bali.

babad, umumnya di tulis tidak lebih dari abad ke 18³. Dengan membelajarkan sastra klasik menggunakan terjemahan dari babad dan naskah-naskah lainnya, tentunya akan banyak warisan bahasa lama termasuk budaya yang dapat dipelajari saat ini.

Untuk mencapai tujuan tersebut, instansi-instansi terkait, pada tahap awal bisa melakukan digitalisasi naskah-naskah yang ada. Usaha seperti ini pernah dan sedang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Target Perpustakaan Nasional saat ini adalah melakukan digitalisasi 10.000 (sepuluh ribu) koleksi naskah klasik yang dimiliki. Usaha yang sama juga sedang dan akan dilakukan Perpustakaan Leiden Belanda yang melakukan digitalisasi koleksi museum sepanjang sekitar 12 kilometer. Langkah berikutnya yang bisa dilakukan adalah melakukan transliterasi dan penerjemahan naskah-naskah koleksi tersebut untuk kemudian disebarluaskan hingga ke sekolah-sekolah. Cara ini perlu ditempuh guna menyediakan sumber belajar terutama bagi guru dan siswa.

Simpulan

Dari pembahasan terkait permasalahan pembelajaran Bahasa dan Sastra Sasak saat

ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Perlu ada sikap positif dari pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang memungkinkan komunitas Bahasa Sasak tumbuh kembang tidak hanya di lingkungan masyarakat kelas bawah tetapi berkesempatan untuk menjadi bahasa resmi di instansi pemerintah. Disamping itu, diperlukan upaya pemerintah untuk menjadikan Bahasa Sasak menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang dipelajari di sekolah-sekolah.
2. Pemerintah daerah beserta instansi terkait perlu mempertimbangkan digitalisasi naskah-naskah klasik koleksi museum NTB untuk selanjutnya disebarluaskan agar bisa dijangkau masyarakat (NTB khususnya).
3. Perlu ada upaya pemerintah terkait untuk melakukan transliterasi ke dalam tulisan latin dan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia, naskah-naskah klasik koleksi Museum NTB. hasil transliterasi dan terjemahan tersebut kemudian didigitalisasi untuk selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat. Dengan demikian dokumentasi bahasa, sastra, warisan sosial budaya sasak yang terdapat dalam naskah-naskah tersebut dapat dipelajari lebih luas. Disamping itu, semakin banyaknya naskah transliterasi dan terjemahan naskah-naskah klasik Berbahasa Sasak akan mempermudah guru dalam proses pembelajaran di sekolah.

SUMBER

- Azhar, Lalu Muhammad. 2003. *Arya Banjar Getas Bedah Takepan-Babad dan Buku Sasak*. Mataram: Yayasan Pendidikan Pariwisata Pejanggiq.
- Hagerdal, Hans. 1995. *Bali in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Suggestions for Chronology of the Gelgel Period*, dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde,

³ Dalam penelitian yang dilakukan terhadap naskah babad di Bali, Hagerdal (198:154) menyebutkan bahwa penulisan naskah babad-babad di Bali tidak akan lebih awal dari abad ke-18 bahkan, kebanyakan dari naskah-naskah babad tersebut kemungkinan ditulis abad ke-19 dan abad ke-20. Penelitian lain terhadap naskah serupa pernah dilakukan Ricklefs terhadap beberapa naskah di Jawa antara lain naskah Babad Jawa dan Sejarah Banten. Dari penelitian tersebut, Ricklefs menemukan bahwa naskah asli Babad Tanah Jawi ditulis pada tahun 1730-an dan 1740-an. Sejarah Banten yang berisi cerita-cerita pengislaman, sebagian besar bertarikh akhir abad ke-19 (Ricklefs, 2009:17-19). Sebagaimana disebutkan Riana dalam penelitiannya (lihat catatan kaki No.2), maka patut diduga, periode penulisan naskah-naskah yang ada di Lombok tidak akan berbeda dengan periode penulisan naskah di Jawa dan Bali.

- (Online), 151 (1) : 101-124, (<http://www.kitlv-journals.nl>), diakses 10 November 2009.
- Habiburrahman. 2011. *Wacana Kekuasaan dalam Naskah Babad Lombok*, Tesis, Universitas Negeri Malang
- Riana, I Ketut. 2009. *Kakawin Desa Warnana Uthawi Nagara Krtagama Masa Keemasan Majapahit*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Ricklefs, M.C. 2008. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200 Fourth Edition*. Terjemahan oleh Tim Penerjemah Serambi. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Sobarna, C. 2007. *Bahasa Sunda sudah di Ambang Pintu Kematiankah?*, dalam Makara, Sosial Humaniora, vol. 11, No. 1, Juni 2007: 13-17.
- Sugiharto B. 2013. *Tinjauan Tentang Latar Belakang Penerapan Bahasa Daerah pada Kurikulum 2013 di Jawa Barat*, online <http://bahasa.kompasiana.com/2013/1/28/penerapan-bahasa-daerah-pada-kurikulum-2013-di-jawa-barat-613871.html>, diunduh Tanggal 28 Agustus 2014.
- Suparman, Gede Lalu. 1994. *Babad Lombok*. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wibawa, S. 2007. *Implementasi Pembelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah dalam Kerangka Budaya Yogyakarta, 8 September 2007
<http://bahasa.kompasiana.com/2013/08/13/menyelamatkan-bahasa-jawa-580736.html>
<http://regional.kompas.com/read/2014/09/08/20241191/Gubernur.Jateng.Segera.Berlakukan.Aturan.Sehari.Berbahasa.Jawa>
- <http://edukasi.kompas.com/read/2012/09/21/17432451/Teras.Narang.Perlu.Ada.Kurikulum.Terkait.Kearifan.Lokal>
<http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/06/13/multilingualisme-di-eropa-penguasaan-beberapa-bahasa-di-eropa-568183.html>
<http://jogja.tribunnews.com/2014/02/28/belanda-simpan-naskah-kuno-kalau-dijajar-panjangnya-bisa-mencapai-12-km/>